

HARIAN
UNTUK UMUM

TERBIT SEJAK
01 MARET 2011

PENDIRI:
Ardi, S.Si, Apt

Baubau Post

Baubaupost.com

Jumat

19 Januari 2024

erani Beda - Kritis, Lugas, Independen

Eceran Rp 5000

Berlangganan Rp 100.000/ bulan

Info Langganan dan Iklan HP/WA: 082160543989

Warga Baubau Antusias Gunakan QRIS Untuk Bayar Tagihan Air Minum, Dalam 2 Hari PDAM Baubau Sukses Bertransaksi Rp 185,6 Juta

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Baubau terbukti mendapat dukungan dan respon positif dari Warga Kota Baubau. Contoh konkrit seperti digitalisasi pembayaran tagihan air minum PDAM Kota Baubau melalui aplikasi dilengkapi dengan model pembayaran QRIS, dalam 2 (dua) hari saja yaitu pada tanggal 15-16 Januari 2024, berhasil menjangkit 893 transaksi pembayaran dengan nilai total transaksi lebih kurang Rp 185,6 juta.

Secara rinci, per tanggal 15 Januari 2024 saat aplikasi PDAM Semerbak diaktifkan tercatat 277 transaksi pembayaran dengan nilai 17,6 juta rupiah. Dan di hari kedua, tanggal 16 Januari 2024 transaksi melonjak 3 (tiga) kali lipat sebanyak 616 transaksi pembayaran dengan total pembayaran hingga pukul 19.30 WITA tanggal 16

Januari 2024, jumlah transaksi yang tercatat mencapai lebih dari Rp 168 juta. Pendekatan PDAM Baubau dengan pembayaran digital ini dirispon luar biasa oleh warga Kota Baubau dengan melakukan pembayaran kewajiban terhadap tagihan rekening air bersih PDAM.

Lanjutan ke Hal: 7

Polres Butur Diminta Tahan Tersangka Kasus Dugaan Penganiayaan Anak Dibawa Umur Peliput : Rahman

BURANGA, BP-Polres Buton Utara diminta segera menahan tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap anak dibawah umur inisial SRTA. Permintaan itu disampaikan kuasa hukum korban, Mawan me-



Lanjutan ke Hal: 7

La Ode Harmawan SH

Dewan Pengurus Korpri Buton Dikukuhkan



Peliput : Rahman

BUTON, BP-Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Buton Periode 2023-2028 resmi

dikukuhkan oleh Wakil Ketua I Dewan Pengurus Korpri Provinsi Sulawesi Tenggara, Dra. Hj. Zanuriah MSi di Aula

Lanjutan ke Hal: 7

Alokasi Dana APBN 2024 Untuk Daerah Wilayah Kepton Kurang Lebih Rp 5 Triliun



Pewarta: Amat Jr

BAUBAU, BP-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama ini menjadi in-

strumen penting dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman dan guncangan yang mengancam perekonomian

seperti yang lalu mengalami pandemi.

Berdasarkan data yang ada pada sistem perben-

Lanjutan ke Hal: 7



Pewarta: Amaran

BAUBAU, BP-Bencana tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Liwuto Kecamatan Koka-

lukuna yang diakibatkan hujan deras beberapa waktu lalu, mendapat perhatian Penjabat Walikota Baubau, Dr Muh

Rasman Manafi, SP, M.Si.

Menurut Dr Muh Rasman Manafi, kesela-

Lanjutan ke Hal: 7



Andina Latief, SKM
DIREKTUR

SEGENAP PIMPINAN, REDAKSI, & KARYAWAN PT FAREN GRAFIKA
PENERBIT SURAT KABAR HARIAN (SKH) BAUBAU POST (www.baubaupost.com)

Mengucapkan :

Terimakasih Kepada Dewan Pers Yang Telah Menetapkan SKH Baubau Post (www.baubaupost.com) Sebagai Media Terverifikasi per Tanggal 30 Desember 2022



Warga Baubau Antusias Gunakan QRIS Untuk Bayar Tagihan Air Minum, Dalam 2 Hari PDAM Baubau Sukses Bertransaksi Rp 185,6 Juta

Kepala Cabang Bank Sultra Baubau, Ainul Hasyim menyampaikan dukungan penuh atas inisiatif pemerintah Kota Baubau dalam memberikan layanan kepada warga kota.

Ini merupakan salah satu inovasi daerah yang dilakukan Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, sehingga dapat mempermudah masyarakat Kota Baubau untuk melakukan Pem-

bayaran dimanapun dan kapanpun. Bank Sultra mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Pj Wali Kota sebagai salah satu pemegang saham terhadap Bank Sultra. Kami terus mendukung Pemerintah Kota Baubau dalam akselerasi Keuangan Daerah, jelasnya.

Di hari kedua ini kita bisa merasakan antusias warga kota baubau merespon hadirnya ap-

likasi pembayaran PDAM secara online. Dukungan Bank Sultra Kota Baubau memberikan penguatan dalam proses layanan keuangan, sehingga monitoring dana yang masuk dapat terpantau secara realtime, ungkap Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi.

Dr Muh Rasman Manafi menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menunjukkan

dukungan dalam menjalankan kewajiban pembayaran air bersih PDAM. Ke depan dan dalam triwulan pertama 2024, beberapa layanan pembayaran seperti pajak bumi dan bangunan, pembayaran retribusi lainnya akan menggunakan pendekatan serupa, kita berharap kemandirian secara fiskal kota Baubau dapat kita wujudkan bersama. (*)

Alokasi Dana APBN 2024 Untuk Daerah Wilayah Kepton Kurang Lebih Rp 5 Triliun

daharaan dan anggaran negara pada tahun 2024 alokasi dana APBN didistribusikan untuk Kepulauan Buton (Kepton) disalurkan melalui kantor KPPN Baubau sejumlah hampir 5 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat dan belanja transfer daerah.

Alokasi APBN ini diperuntukkan bagi 105 satuan kerja dan instansi vertikal pemerintah dan 6 pemerintah daerah.

Hal ini diungkapkan Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si saat rapat koordinasi manajerial pelaksanaan anggaran regional Kepton hari Selasa (16/1/2024).

Mengutip pesan Presiden RI Joko Widodo pada saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer Ke Daerah (TKD) Dr Muh Rasman Manafi menegaskan, pihaknya telah berkomitmen menggunakan anggaran ini

dengan disiplin. Paling tidak efisien melalui beberapa hal yakni, belanja harus sesuai dengan prioritas, transparan dan akuntabilitas serta tidak boleh ada korupsi serta sinkron dengan pembangunan pusat dan daerah.

Kemudian, antipasi ketidakpastian melalui dan eksekusi pelaksanaan anggaran diawal tahun, sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Selain itu, perkuat sinergi dan kerja sama antar program dan antar kegiatan lintas kementerian, pusat dan daerah maupun antar pemerintah dan badan usaha. Menjaga integritas dan tata kelola sebagai bentuk pertanggungjawaban, pengolahan dana transfer ke daerah untuk perbaikan layanan publik itu menjadi prioritas khususnya pendidikan dan Kesehatan.

Perbaiki kebijakan dan administrasi perpajakan daerah dan tetap menjaga investasi dan kesempatan untuk bekerja. Perkuat

sinergi dan harmonisasi kebijakan, mendorong penggunaan pembiayaan kreatif, melaksanakan monitoring serta mendorong sinergitas pelaksanaan dana desa dalam pencapaian prioritas nasional.

Melalui penyerahan DIPA di tingkat nasional dan provinsi, ini tentu kita telah berkomitmen untuk siap melaksanakan secara baik tepat waktu, akuntabel dan transparan. Digitalisasi penyerahan DIPA dan TKD 2024 memberikan kemudahan dalam bentuk penyederhanaan proses bisnis serta peningkatan keamanan data dalam pelaksanaan APBD dan APBN sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di Kota Baubau ini memberikan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para kuasa pengguna anggaran, satuan kerja instansi vertikal yang sudah merancang yang terbaik dari

semua indikator kinerja pelaksanaan anggaran pertanggungjawaban APBN serta upaya dukungan program pemerintah atas implementasi digitalisasi mekanisme pembayaran dana APBN 2023.

Kami di Pemkot Baubau hari ini sudah melaksanakan digitalisasi pembayaran yakni salah satunya itu adalah PDAM. Jadi kita sudah menggunakan QRIS dalam sistem pembayarannya. Capaian terbaik tersebut semoga menjadi bekal dan tentu dapat kita contoh untuk membangun optimisme dan motivasi untuk kita semua, kita berkomitmen khususnya yang berada di wilayah Kepton ini. Mari kita bekerja keras dan bersinergi dan bahu membahu dalam mengolah APBN yang lebih baik kedepan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi kita dan menjaga penggunaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, tutupnya. (*)

Dr Muh Rasman Manafi Gerak Cepat Tangani Bencana Tanah Longsor di Liwuto

matan warga adalah prioritas utama Pemkot Baubau dengan mengambil langkah-langkah terbaik sebagai upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya korban jiwa dari masyarakat yang diakibatkan dari bencana tanah longsor.

BPBD dan Dinas

PUPR Kota Baubau ditugaskan bekerjasama segera secepatnya memberikan perbaikan untuk menjaga keselamatan warga.

“Besok (kamis 18/1/2024) saya akan ke Jakarta untuk memastikan penyelesaian masalah ini,” jelas Pj Wali Kota Baubau Dr

Muh Rasman Manafi kepada warga yang meminta agar longsor tebing tersebut segera dibenahi.

Dr Muh Rasman juga menghimbau warga Liwuto untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari pihak berwenang. Informasi lebih lanjut dan perkembangan terkini akan terus disampaikan

kan oleh Pemerintah Kota Baubau.

Dalam inspeksi turut hadir Lurah Liwuto Sarif Male dan Lurah Sukanayo Tajuddin. Juga dilakukan pertemuan dan berdialog dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk mendengarkan secara langsung laporan dan kesulitan yang dihadapi warga. (*)

Dewan Pengurus Korpri Buton Dikukuhkan

Bupati Buton Kompleks Perkantoran Takawa Rabu, 17 Januari 2023

Korpri Kabupaten Buton diketuai Sekda Buton, Asnawi Jamaluddin, MSi dan Pj Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, MSi sebagai Penasehat Korpri Kabupaten Buton.

Pj Bupati Buton pada kesempatan itu berharap Dewan Pengurus Korpri yang dikukuhkan tersebut dapat menjadi semangat baru dari Korpri Kabupaten Buton. Dan keberadaannya dapat dirasakan bermanfaat oleh para anggotanya baik secara profesional, netral dan sejahtera.

“Saya amanatkan dengan semangat baru ini, kepemimpinan baru ini yang diketuai oleh Pak Sekda, agar keberadaan Korpri ini bisa dirasakan manfaatnya oleh para

anggotanya,” ujarnya. Sekwan Provinsi Sultra mengatakan Korpri harus terdapat dan untuk dewan pengurus yang baru saja di lantik untuk bisa menjalankan program-program pemerintah dan bukan untuk memenuhi syarat formalitas serta bisa mengadvokasi semua keluhan anggota organisasi.

Korpri diharapkan menjadi organisasi yang berperan penting dalam pembangunan bangsa, negara, dan daerah. Ia mengharapkan pengurus Korpri Kabupaten Buton 2023-2028 dapat meningkatkan peranannya kepada ASN dan masyarakat melalui program yang bermanfaat, katanya.

Dalam sambutannya Wakil Ketua 1 Dewan Pengurus Korpri Provinsi Sulawesi Tenggara Dra. Hj. Zanuria, MSi

berharap kepada Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Buton yang baru dikukuhkan, bisa menjalankan roda organisasi dengan baik. Sesuai dengan tujuan dan fungsi Korpri dalam melakukan pembinaan, menjaga profesionalisme, punya Jiwa Korsa, kesejahteraan dan bantuan hukum.

“Untuk itu Korpri harus dapat memberikan dukungan untuk Reformasi birokrasi,” ungkapnya

Kepala BKD Provinsi Sultra ini mengharapkan Korpri menjadi wadah untuk mempelajari hal yang baru menjawab tantangan yang dihadapi Masyarakat. Untuk itu perlu diketahui untuk bisa melayani masyarakat dengan baik dengan cara yang baik secara bersama-sama. (*)

Polres Butur Diminta Tahan Tersangka Kasus Dugaan Penganiayaan Anak Dibawa Umur

lalui press releasenya, malam Kamis 17 Januari 2024.

“Kasusnya sudah tahap penyidikan/sidik atau sudah ditetapkan sebagai tersangka terduga pelaku oleh pihak penyidik perlindungan perempuan dan anak atau PPA Polres kabupaten Buton Utara pada hari Selasa tanggal 16 Januari tahun 2024,” kata Mawan.

Mawan mengatakan, penyidik sudah menembuskan surat penetapan tersangka ke terduga pelaku inisial SRTA, serta penyidik PPA Polres kabupaten Buton Utara sudah mengirim surat perintah dimulainya penyidikan ke kejaksaan negeri Raha.

“Melalui koordinasi saya pada hari Selasa tanggal 16 Januari tahun 2024, melalui Kaspidum kejaksaan negeri raha mengatakan bahwa SPDP kasus dugaan penganiayaan terhadap anak di kecamatan kulisusu Utara kabupaten Buton Utara sudah diterima dan Jaksa penuntut umumnya adalah ibu Yulia,”

Mawan sebagai kuasa hukum korban, mendesak Kapolres untuk secepatnya melakukan langkah penahanan terhadap terduga pelaku dalam minggu ini.

“Jika tidak maka saya sebagai pendamping hukum korban akan melakukan langkah-langkah penyuratan ke bapak Kapolda dan Kadiv Propam Polda Sultra dalam minggu ini, karena tidak ada alasan ataupun alibi lagi untuk menunda-nunda langkah penahanan terhadap terduga pelaku penganiayaan terhadap anak di kecamatan Kulisusu Utara kabupaten Buton Utara,”

Menurut Waman, hal sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ataupun

KUHAP/KUHP, sangat jelas bahwa ketika suatu perkara pidana sudah naik ketahap penyidikan/sidik berarti kasus tersebut sudah mencukupi alat bukti. Kasus tersebut masuk atau mengarah ke ranah pidana dan sudah ada tersangkanya.

“Saya kira bapak Kapolres maupun kasat Reskrim polres kabupaten Buton Utara lebih paham dalam hal aturan main setiap proses perkara. Jangan lah di istimewa terduga pelaku penganiayaan terhadap anak di kecamatan Kulisusu Utara karena tidak ada yang kebal terhadap hukum dan perlakuan tetap sama Dimata hukum”,

Lanjut Mawan, siapapun yang berhadapan dengan hukum harus ditindak tegas tanpa ada pandang bulu. Dan marilah kita sama-sama menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi di negara ini, jangan sebaliknya di bolak balik seperti pepatah mengatakan bahwa hukum tajam kebawah dan lucu ke atas atau hukum hanya berlaku pada rakyat kecil dan tumpul pada yang berduit.

“Bapak Kapolri menginginkan institusi kepolisian/Polri masih terus dipercaya di publik/masyarakat dengan menerapkan sistem hukum yang seadil-adilnya dan profesional bukan malah sebaliknya, sehingga harapan rakyat pada institusi kepolisian sirna dan kepercayaan sudah tidak adalagi. Marilah kita sama-sama mengawal program bapak Kapolri yaitu PRESIS,” tutupnya.

Dua bulan yang lalu kasus ini tepatnya pada November 2023 viral di media massa dan menghebohkan dunia maya, publik dan masyarakat di kabupaten Buton Utara secara umum dan secara khusus lagi masyarakat kecamatan kulisusu Utara. (*)

Kaesang Bungkam Usai Jumpa Sultan Yogya, Sekda Bantah Isu Ade Armando



Ketum PSI Kaesang putra Jokowi melakukan pertemuan tertutup dengan Sultan DIY.

Laporan: Hasim

JAKARTA -- Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep bungkam mengenai isi pertemuannya dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Minggu (14/1) pagi.

Kaesang didampingi istrinya, Erina Gudono menemui Sultan secara tertutup di Gedhong Wilis mulai sekitar pukul 09.00 WIB. Pertemuan di Gedhong Wilis dilakukan secara tertutup. Sementara wartawan hanya diperkenankan mengambil gambar dari Balai Woro.

Sekitar pukul 09.50 WIB, Kaesang dan Erina keluar dari Gedhong Wilis. Mereka langsung masuk mobil dan meninggalkan lokasi menuju Pasar Beringharjo.

Di Pasar Beringharjo, Kaesang didampingi sejumlah kader PSI berbelanja sejumlah busana batik bersama Erina. Mereka menyusuri lorong-lorong lapak sambil terus diserbu emak-emak serta pengunjung pasar lain yang mengajak berswafoto.

Selesai belanja, Kaesang yang merupakan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu keluar melalui pintu timur pasar dan tak

menjawab pertanyaan wartawan mengenai isi pertemuannya dengan Sultan.

Selanjutnya, Kaesang bersama rombongan menuju ke Ambarukmo Plaza. Ia sempat ke wahana bermain Timezone sebelum ke acara makan siang dan dialog bersama influencer hingga sekitar pukul 14.00 WIB.

Selepas acara, Kaesang hanya menjelaskan perihal agenda dialog dengan para influencer dan tak merespons pertanyaan agenda bertemu Sultan.

Terpisah, Sekda DIY Beny Suharsono mengatakan, Kaesang bersama istrinya datang menemui Sultan tanpa mengenakan atribut partai. Beny menjelaskan kapasitas Sultan menerima Kaesang hari ini sebagai Gubernur DIY.

"Kedatangannya (Kaesang dan Erina) silaturahmi sebagai generasi muda berdialog situasi kekinian yang terjadi saat ini. Intinya dialog kekeluargaan," kata Beny di Kompleks Kepatihan.

Dalam kesempatan itu, kata Beny, Kaesang sebagai generasi muda yang terjun ke dunia politik juga sempat meminta masukan dari Sultan.

"Menurut saya yang menarik, karena beliau adalah pemimpin muda ingin mendapatkan banyak masukan. Ngarsa Dalem kan juga per-

nah memimpin hal yang sama dulu, bahkan 3 periode (pasca keluarnya UU Keistimewaan) sehingga pelan-pelan itu disampaikan ke Mas Kaesang," ujarnya.

Beny juga menekankan, bahwa dalam pertemuan tertutup itu tidak ada pembahasan mengenai Ade Armando dan polemik ucapan politik dinasti di Yogyakarta.

"Mboten (Tidak), itu kan sudah berlalu, sudah selesai. Mas Kaesang hanya dialog kenegaraan saja, karena generasi muda jadi ya dialognya ala generasi muda," katanya.

Selain itu, lanjut Beny, permintaan maaf dari PSI menyangkut ucapan Ade Armando juga sudah disampaikan sekjen parpol berlambang mawar tersebut, Raja Juli Antoni beberapa waktu lalu.

"Lho kan sudah dilakukan oleh pak Sekjen sudah menyampaikan ke situ, antara lain dialognya sampai sana (pertemuan Raja Juli Antoni dengan Sultan)," ujarnya.

Terlepas dari hal ini, Beny menyebutkan jika Sultan bakal menerima tokoh-tokoh politik dengan pintu terbuka.

"Siapapun yang ingin bertemu beliau dengan senang hati akan menerimanya. Karena sebagai bagian daripada demokratisasi," pungkask Beny. (*)

PDIP Buka Suara soal 150 Anggota Sayap Partai Mundur Susul Maruarar

JAKARTA- Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto men-

ganggapi kepergian sejumlah kader hingga simpatisan

menjelang Pemilu dan Pilpres 2024 sebagai bagian dari dinamika partai.

Politikus Demokrat Pertanyakan Nasib Revisi UU Desa



Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron mempertanyakan kelanjutan pembahasan revisi Undang-undang tentang Desa.

Laporan: Hasim

JAKARTA-Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron mempertanyakan kelanjutan pembahasan revisi Undang-undang tentang Desa.

Herman sempat melontarkan interupsi dalam Rapat Paripurna pembukaan masa sidang III, Selasa (16/1). Herman mengaku menerima banyak pertanyaan dari kepala desa selama reses terkait revisi UU Desa.

"Saya banyak mengunjungi desa-desa, tentu dalam jelang pemilu ini, satu hal yang ditanya bagaimana kelanjutan UU Desa yang telah diputuskan di paripurna di DPR," kata Herman dalam pernyataannya.

Dia mendorong DPR untuk memberi kejelasan soal status RUU Desa. Sebab, hingga kini para kepala desa terus mempertanyakan proses pembahasan RUU tersebut.

Hasto merespons keputusan 150 anggota sayap partai PDIP, Taruna Merah Putih (TMP) di Majalengka, Jawa Barat yang ikut menyatakan mundur menyusul Maruarar Sirait. TMP merupakan salah satu organisasi sayap partai PDIP yang ikut didirikan oleh Maruarar.

"Sehingga ketika di dalam bagian dalam proses itu ada yang mundur, ada yang tidak loyal itu adalah hal yang biasa, dinamika partai," ucap Hasto di Media Cen-

"Para kepala desa sampai hari ini belum mendapat kepastian terkait dengan tuntutan tersebut. Oleh karena itu saya mohon pimpinan dapat menjelaskan terkait dengan keberlanjutan undang-undang desa tersebut," kata Herman.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memahami bahwa RUU Desa saat ini banyak didorong oleh sejumlah organisasi aparat dan kepala desa. Namun, Dasco mengaku tak ingin RUU tersebut menjadi alat politisasi dan hanya menguntungkan salah satu paslon.

Politikus Partai Gerindra itu ingin aspirasi kepala desa tidak hanya disampaikan kepada fraksi-

si-fraksi tertentu, melainkan ke seluruh fraksi di DPR.

Dasco mempersilakan organisasi kepala desa bertemu fraksi-fraksi untuk meminta penyelesaian revisi UU Desa di sisa masa waktu periode DPR saat ini.

"Kita sama-sama tahu para kepala desa ini memang aktif meminta revisi di DPR. Namun karena menjelang tahun politik, kita tidak mau bahwa revisi UU Desa itu kemudian diuntungkan pada 1 atau 2 parpol saja di parlemen ini," kata Dasco.

DPR sebelumnya telah menerima Surat Presiden (Surpres) untuk segera menindaklanjuti pembahasan revisi UU No-

mereka. Dalam pernyataannya, mereka mengaku ingin mengikuti langkah Maruarar Sirait yang sehari sebelumnya telah terlebih dulu menyatakan mundur.

"Kami telah merasakan dan melihat track record beliau, kontribusi Bang Ara untuk Majalengka sangat besar, dan Pak Jokowi juga memberikan kontribusi luar biasa bagi Indonesia," kata Bendahara TMP Majalengka, Dena M Ramdan, Selasa (16/1). (p1)

yang bergabung. Dia menyebut partainya telah teruji selama ini. "Dulu juga pernah ada beberapa, Pak Laksamana Sukardi, Pak Roy BB Janis almarhum dan sebagainya. Terbukti partai tetap kokoh berdiri," katanya. Sebanyak 150 kader PDIP yang tergabung dalam sayap partai TMP di Majalengka sebelumnya menyatakan mundur. Mereka mendatangi kantor DPC PDIP Majalengka untuk menyatakan sikap

Pemprov Sultra Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Secara Virtual



Pewartu: Lisna

SULTRA, BP-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di daerah yang setiap minggunya melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Mendagri RI) dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Sultra, (Senin, 15 Januari 2024).

Rakor secara virtual yang dilaksanakan serempak diseluruh Indonesia dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal (Irgen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Toms Tohir, dihadiri sejumlah pejabat diantaranya Direktur Statistik Harga BPS Dr. Windhiarso Putranto, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Bambang Sugiharto, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, Kabid Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari, Wakasatgas Pangan Polri, Direktur Pertimbangan Hukum Kejaksaan Agung, Staf Ahli Bidang Ekonomi Brigjen TNI Eko Nursanto.

Turut hadir dari jajaran Pemprov Sultra yakni Kadis Keta-

pang, Karo Adm. Pembangunan Setda, Perwakilan Kantor Wilayah BI, Sekdis ESDM, Kadin dan Asdatun Kejati, Karantina Pertanian serta Pejabat terkait.

Dalam arahannya Irgen Kemendagri, Toms Tohir mengatakan pada rakor pengendalian inflasi di minggu kedua Januari ini lebih difokuskan kepada kenaikan harga dan mengantisipasinya. "Pada Indeks Perkembangan Harga (IPH) bahan pangan di minggu kedua Januari ini, ada tiga komoditas yang naik dibanding minggu lalu, yakni bawang merah di 360 daerah Kab/Kota, bawang putih 326 daerah Kab/Kota, dan daging ayam ras 212 daerah Kab/Kota. Kita harus fokus mengatasi kenaikan harga tiga komoditas tersebut," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik Windhiarso Putranto menyampaikan dalam paparannya, inflasi bulan Januari selalu dominan disebabkan oleh inflasi komponen harga bergejolak. "Secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH turun sebesar 9 persen poin. Wilayah dengan persentase penurunan terbesar secara berturut-turut adalah Pulau Jawa (16,85 persen poin), Pulau Sumatera (-13,08 persen poin), dan Luar Pulau Jawa dan Sumatera (-4,48 persen poin)," ungkapnya.

Ia menyebut, ko-

moditas cabai rawit masih mengalami fluktuasi harga yang cukup signifikan hingga minggu kedua Januari ini. Fluktuasi harga komoditas tersebut terjadi di 156 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Adapun 10 Kab/Kota dengan kenaikan IPH tertinggi diluar pulau Jawa dan Sumatera, salah satunya di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna Barat dengan IPH 3,94 persen dan komoditas andil terbesar cabai rawit, beras, bawang putih, serta Kabupaten Buton dengan IPH 2,44 persen dan komoditasnya ikan kembung/ikan gembung, bawang merah, cabai rawit.

Usai mengikuti Rakor Inflasi, Kadis Ketapang menyampaikan bahwa inflasi Sulawesi Tenggara per-desember berada dibawah angka inflasi Nasional yakni 2,58 dan Nasional 2,61 persen.

"Untuk perkembangan IPH Alhamdulillah dibandingkan IPH Minggu pertama Januari kita relatif membaik, kemarin Provinsi Sulawesi Tenggara berada di urutan ke-7 nasional dan sekarang sudah berada di urutan ke-22 IPH terendah dari 38 Provinsi yakni dengan angka -0,08 persen, ini satu capaian yang cukup menggembirakan" ungkapnya.

Selain itu, Kadis Ketapang Sultra, Ari Sismanto berharap pada Minggu ini sudah di intensi untuk gerakan pangan mu-

Hadir Rapat Kerja AWI pada Minggu, Sekda Sultra : Berpikir dan Berbuat Tentang Kemajuan Pendidikan Tak Mengetahui Hari



Pewartu: Mashuri

KENDARI - *Setibanya di Bumi Anoa menggunakan Pesawat Garuda sekira Pukul 10.00, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs H. Asrun Lio., M.Hum Ph.D langsung menghadiri acara rapat kerja daerah Asosiasi Widyaprada Indonesia (AWI) Sultra, bertempat di Aula Garuda Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sultra, Minggu (14/1/2024).*

Kehadiran Jenderal ASN Provinsi Sultra dalam acara tersebut sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap dunia pendidikan, sehingga setiap pihak baik organisasi, kelembagaan, hingga yang bersifat individu, tetap terpacu untuk bersama-sama berpikir dan bertindak, demi kemajuan pendidikan di Sultra.

"Acara yang digelar hari ini meskipun Minggu, menandakan bahwa berbicara dan bertindak tentang bagaimana pemetaan pendidikan, bagaimana menjamin mutu pendidikan, hingga bagaimana melakukan supervisi serta pendampingan kepada satuan pendidikan di Sultra itu tidak mengetahui hari," tutur Sekda Sultra ini.

Saat memberikan sambutan pada aca-

ra pembukaan rapat kerja AWI Sultra tersebut, Ketua IKA Unhas Koordinator Wilayah Sultra ini menitip pesan kepada pihak Asosiasi Widyaprada Indonesia (AWI) Sultra termasuk kepada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sultra untuk dapat berkolaborasi dengan lembaga yang telah dibentuk oleh Pemprov Sultra beberapa tahun lalu melalui Dikbud Sultra, yang bekerjasama dengan Putera Sampoerna Foundation (PSF), yakni Teachers Learning Center (TLC).

"Dalam rangka upgrade dan melatih pengetahuan para tenaga pendidik, telah ada namanya TLC. Telah dibangun beberapa tahun lalu, dimana setiap tahunnya ada target capaian. Pertama,

membangun struktur organisasinya dengan menempatkan orang-orang pilihan dan terlatih. Kedua, lembaga ini kemudian bekerja serta merumuskan secara teknis terkait peningkatan kualitas guru, agar semua tenaga pengajar memiliki kualitas yang sama, baik yang ada di Kota Kendari hingga ke pelosok-pelosok di setiap wilayah Sultra," tuturnya.

Dia melanjutkan, tentu keberadaan BPMP dan AWI Sultra dibutuhkan untuk turut membesarkan TLC Sultra, sehingga setiap guru ataupun tenaga pendidik dapat datang dan bisa berdiskusi bersama.

"Seperti tema yang diusung dalam rapat kerja AWI Sultra ini yakni merangkai kerja profesional dalam penjamin-

mutu pendidikan. Tentu sebagai salah satu motivasi untuk menjaga serta memacu komitmen kita, agar bagaimana turut mengambil peran dalam peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Sultra," pesannya.

Asrun Lio berpesan, layaknya setiap orang yang berupaya menyesuaikan diri terhadap kemajuan teknologi, maka demikian dengan dunia pendidikan, dimana setiap individu, organisasi, maupun lembaga boleh berperan. Dia mencontohkan tentang Menteri Pendidikan RI, Nadiem Anwar Makarim, dimana meskipun pengusaha namun karena pengalaman yang dimiliki, sehingga mendapatkan kepercayaan memimpin satu kementerian.

"Melalui forum-forum ini, banyak hal yang harus terus kita upayakan, agar mutu pendidikan kita selalu baik dari tahun ke tahun, melalui standar atau target yang telah ditetapkan," tutupnya.*

rah di Kab. Muna Barat dan Kab. Buton, maka gerakan pangan murah untuk Kab Muna Barat baru bisa dilaksanakan nanti hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 melalui dinas ketah-

anan pangan yang akan melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah di Kab. Muna Barat selama 3 hari dan Kab. Buton akan di buka pada hari Kamis tanggal 18 Januari

untuk gerakan pangan murah selama 3 hari berturut-turut.

Adapun catatan dari statistik bahwa komoditas-komoditas yang naik antara lain, bawang merah, bawang putih dan

cabai. meskipun masih tinggi diatas harga acuan pemerintah namun harga cabai sekarang sudah relatif turun dibandingkan minggu-minggu sebelumnya.*

Pj. Bupati Buton La Ode Mustari Tekankan Disiplin dan Peningkatan Kualitas Kerja



Pewarta: Rahman

BUTON, BP-Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, M.Si, kembali menegaskan para ASN dan Non ASN Lingkup Pemkab Buton untuk menegakkan disiplin termasuk kehadiran dan peningkatan kualitas kinerja ASN juga pelayanan publik

Penegasan itu disampaikan Bupati Buton saat menjadi Irup pada Hari Kesadaran Nasional yang dilaksanakan setiap tanggal 17 di Alun-alun Takawa, Pasarwajo, Rabu, 17 Januari 2024

Selain itu orang nomor satu di buton ini juga menyinggung pengendalian inflasi di

Kabupaten Buton Sekwan DPRD Sultra ini mengingatkan para aparatur sipil negara di Bumi pebghasil Aspal Alam terbesar di dunia itu Untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian akan pelaksanaan tugas-tugas baik harus ada peningkatan kualitas yang harus diberikan baik pada negara maupun pada Masyarakat.

Mantan kepala BKD Provinsi Sultra ini mengajak para ASN untuk membumikan 8 arahan presiden. "Sebagai Pj. Bupati Buton saya tidak memiliki visi misi dalam menjalankan pemerintahan di Kabupaten Buton. Tapi saya tekankan adalah menjalnakan, melak-

sanakan dalam kehidupan berpemerintahan yakni 8 arahan presiden," kata Pj Bupati.

Arahan presiden itu lanjut Pj. Bupati merupakan sebuah gerakan untuk kita bumikan bersama di Kabupaten Buton. Pj. Bupati mengesakan untuk terus melakukan inovasi bagaimana menekan inflasi, menurunkan angka stunting, kemiskinan ekstrim.

Orang nomor satu di Buton ini mengajak dinas terkait untuk menyusun strategi dalam upaya mencegah dan mengatasi inflasi yaitu dengan melaksanakan gebyar pangan murah dan melakukan operasi pasar terbuka. (*)

Pemkab Buton Gelar Evaluasi Kinerja TPPS

Pewarta: Rahman

BUTON, BP-Pemerintah Kabupaten Buton melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menggelar Rapat evaluasi kinerja percepatan penurunan stunting di Kabupaten Buton 2023. Giat yang melibatkan semua Penguat Stunting itu dipusatkan di Aula Kantor Bupati Buton Kompleks Perkantoran Takawa, Kamis 21 Desember 2023.

Evaluasi kinerja percepatan penurunan stunting di Kabupaten Buton 2023 menghadirkan Forkopimda, Kepala OPD, Sekretaris Dinas dan eselon III lainnya terkait, Kabag Hukum, Kabag Kesra, Kepala Kantor Kemenag, Kepala Bdan Pusat Statistik, Camat se-Kabupaten Buton, IBI, Petugas Gizi Puskesmas, Bidan Koordinator, Ketua TP PKK Kecamatan Psarwajo, Admin TPPS, Bidan Desa, TPK Kader KB, Rapat Avaluasi Kinerja di pimpin oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Buton, Drs. Muhidin Mahmud.

Dalam arahannya Asisten 3 menyampai-

kan, intervensi stunting merupakan program nasional yang dilaksanakan mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dengan melibatkan unsur tenaga kesehatan dan pemerintah melainkan unsur-unsur lainnya termasuk di dalamnya akademisi, bisnis, masyarakat, serta media.

"Program intervensi stunting ini program Indonesia yang dilaksanakan mulai dari presiden hingga ke tingkat bupati," ucapnya.

intervensi stunting yang dilakukan tersebut tidak hanya menasar tata laksana balita dengan masalah gizi, melainkan dilaksanakan melalui mengencarkan gerakan minum tablet tambah darah pada remaja putri guna mencegah anemia, pemantauan tumbuh kembang, imunisasi lengkap pada balita melalui posyandu, serta pendampingan calon pengantin dan ibu hamil "Sekarang ini fokus kita tidak hanya mendorong anak yang telah lahir den-

gan masalah gizi kita tingkatkan asupannya. Melainkan sejak bayi dalam kandungan harus terus dipantau sehingga bisa diantisipasi munculnya stunting baru," sambungnya.

Guna mendorong optimalisasi dalam pelaksanaan intervensi stunting, dikatakan diperlukan adanya evaluasi yang dilakukan secara rutin sehingga diharapkan berbagai permasalahan teknis yang selama ini masih ditemukan di lapangan dapat segera diselesaikan.

Selain itu, peningkatan kolaborasi antar stakeholder serta pendampingan keluarga dengan melibatkan kalangan akademisi juga menjadi faktor yang penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan akibat stunting

"Mohon untuk TPPS diharapkan bisa melaksanakan rapat evaluasi secara rutin, sehingga bisa diketahui sejauh mana pelaksanaan intervensi stunting yang terjadi di lapangan," pungkasnya. (*)

Pj Bupati Buteng Lantik dan Ambil Sumpah 13 Pj Kepala Desa



Pewarta: Ardi

BUTENG, BP-Penjabat (Pj) Bupati Buton Tengah (Buteng), Andi Muhammad Yusuf melantik dan mengambil sumpah 13 Penjabat (Pj) Kepala Desa, di Aula Kantor Bupati Buteng, Senin (15/1/2024).

Pelantikan yang berlangsung khidmat turut dihadiri oleh staf ahli, asisten, kepala OPD, Camat dan para ASN lingkup Pemkab Buton Tengah.

Adapun ke 13 Pj Kepala Desa yang dilantik yakni Pj Kepala Desa Kolawa Kec. GU, Pj Kepala Desa Bantea Kec. GU, Pj Kepala Desa Baruta Kec. Sangia Wambulu, Pj Kepala Desa Baruta Sangia Wambulu, Pj Kepala Desa Waara Kec. Lakudo, Pj Kepala Desa Matawine Kec. Lakudo, Pj Kepala Desa Lolibu Kec. Lakudo, Pj Kepala Desa Wantopi Kec. Mawasangka Timur, Pj Kepala Desa Bungi Kec. Mawasangka Timur, Pj Kepala Desa Langkomu Kec.

Mawasangka Tengah, Pj Kepala Desa Kancebungi Kec. Mawasangka, Pj Kepala Desa Oengkolaki Kec. Mawasangka, Pj Kepala Desa Matara Kec. Mawasangka.

Dalam kesempatan ini, Pj Bupati Bupati, Andi Muhammad Yusuf mengucapkan selamat kepada para Pj Kepala Desa yang diambil sumpah dan jabatan dan pelantikannya.

"Semoga amanah yang telah diberikan dapat dijalankan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Buktikan bahwa bapak/ibu adalah ASN pilihan di Kabupaten Buton Tengah yang amanah, tunjukan dengan prestasi kerja, munculkan ide-ide dan inovasi baru, guna meningkatkan kinerja dan program-program kerja desa, agar menjadi lebih baik dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan warga desa di Kabupaten Buton Tengah.

Untuk di ketahui, dari 13 Kepala Desa devinitif, telah berakhir masa jabatannya

pada tanggal 28 Desember 2023 yang lalu, maka sesuai peraturan daerah Kabupaten Buton Tengah nomor 13 tahun 2022 tentang pemilihan kepala desa, bupati mengangkat penjabat kepala desa dari PNS daerah sampai dengan terpilihnya kepala desa devinitif hasil pemilihan kepala desa serentak pada tahun 2025.

"Saya atas nama jajaran pemerintah Kabupaten Buton Tengah, maupun selaku pribadi menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada 13 kepala desa devinitif yang telah berakhir masa jabatannya. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdianya selama ini dalam membangun desanya. Harapan kami setelah purna bakti kiprahnya dalam membangun desa tetap kami harapkan", ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, ada beberapa hal yang ingin kami tegaskan kepada Pj Kepala Desa.

Pertama, laksanakan dan sukseskan penyelenggaraan pemerintahan desa dan program pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa.

Kedua, laksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang berorientasi pada kebutuhan warga desa dan fokus untuk terwujud-

nya kemandirian desa. Karena target kita pada tahun 2025 seluruh desa diharapkan sudah mencapai tingkat desa maju pada status indeks desa membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian desa, serta sukseskan program nasional prevalensi stunting, inflasi dan penuntasan kemiskinan ekstrim.

Ketiga, kepada Pj kepala desa untuk memahami peraturan bupati Buton Tengah nomor 81 tahun 2022 tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa.

Keempat, Pj Kepala Desa tidak diperkenankan memberhentikan perangkat desa. Jika terpaksa harus dilakukan, lakukan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima, setelah pelantikan ini segera lakukan serah terima aset pemerintah desa dengan kepala desa terdahulu, termasuk serah terima keuangan dengan membuat berita acara serah terima.

Ke enam, terus bangun koordinasi, komunikasi, harmonisasi, serta kolaborasi dengan seluruh lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa serta seluruh elemen masyarakat yang ada.

"Mari dukung dan sukseskan pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024, ciptakan kondusifitas di desanya masing-masing. Junjung tinggi netralitas sebagai ASN maupun sebagai perangkat Desa", pungkasnya. (*)

Jokowi Minta Nadiem Naikkan Anggaran Riset Sebelum Ganti Presiden

Laporan: Warman

SURABAYA -- Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menaikkan anggaran riset sebelum pergantian presiden.

Jokowi belajar dari kunjungannya ke Amerika Serikat dan Vietnam. Dia melihat dua negara itu sangat memberi perhatian terhadap penelitian dan para peneliti.

"Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Enggak apa-apa dimulai tahun ini. Nanti kan sudah ganti presiden, tetapi dimulai itu yang gede. Jadi, presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan," kata Jokowi

pada pembukaan Konvensi Kampus XXIX dan Temu Tahunan Forum Rektor Indonesia di Surabaya, Senin (15/1).

Jokowi mengatakan anggaran itu akan dipakai untuk mendukung riset di semua perguruan tinggi. Menurutnya, perguruan tinggi harus menjadi pihak yang berperan dalam pengembangan penelitian.

Dia menilai hal itu bisa dilakukan bila ada anggaran memadai. Jokowi menegaskan penambahan anggaran itu harus segera dilakukan.

"Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03 (yang menang pilpres), tetapi dimulai dulu. Enggak mungkin kalau Pak Nadiem sudah me-

nambahkan banyak, presiden yang akan datang motong, enggak berani," ujar Jokowi.

Jokowi juga mengkaji penambahan anggaran untuk mendorong penambahan lulusan S2 dan S3. Di mengatakan rasio lulusan pascasarjana di Indonesia masih sangat kecil.

Ia menyebut perbandingan lulusan S2 dan S3 di Indonesia terhadap penduduk produktif cuma 0,45 persen. Jokowi menyebut rasio di Malaysia dan Vietnam sudah mencapai 2,43 persen.

"Saya minggu ini akan rapatkan ini dan mengambil kebijakan, policy, untuk mengejar angka yang masih 0,45 persen," ungkap Jokowi. (*)

Pj Wali Kota Baubau Dr Rasman Ingin Tingkatkan Anggaran Puskesmas



Laporan: Andina L

BAUBAU, BP-Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si kembali mengunjungi puskesmas. Kali ini giliran Puskesmas Sulaa dan berdialog dengan tenaga kesehatan Selasa (16/1/2024).

Perhatian pertama Orang Pertama di Kota Baubau ini adalah anggaran puskesmas yang minim dan akan

ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

Hanya saja menurut Dr Muh Rasman, saat ini sudah masuk di awal tahun 2024 dan rencana untuk tahun 2024 itu sudah diselesaikan sehingga semua usulan yang memungkinkan tidak bisa dimasukkan maka akan dikoreksi di perubahan anggaran di 2024.

Dan itu direncanakan di bulan Juni

tahun 2024.

Meski demikian, Puskesmas tetap semangat tinggi untuk membangun puskesmasnya sehingga fungsi pelayanan masyarakat harus terpenuhi.

"Mengapa saya katakan ini karena apa bila kita membangun tim yang kuat itu maka tim yang lemah itu kita harus perkuat itulah kekuatan tim kita," tegasnya.

Dr Muh Rasman Manafi menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran puskesmas yang sudah semangat berjuang melakukan akreditasi dan semoga apa yang diharapkan itu bisa didukung oleh Dinas Kesehatan. Apalagi, Puskesmas sudah membangun kebersamaan untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama untuk melayani masyarakat. (*)

Jokowi Kaget Jumlah Lulusan S2 dan S3 Indonesia Kalah dari Malaysia



Presiden Jokowi mengaku kaget dengan data rasio jumlah lulusan S2 dan S3 Indonesia terhadap penduduk produktif.

Laporan: Yeti

JAKARTA-- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku kaget dengan data rasio jumlah lulusan S2 dan S3 Indonesia

terhadap penduduk produktif. Dia menyebut Indonesia kalah dari Malaysia dan Vietnam.

Jokowi menyebut rasio lulusan S2 dan S3 terhadap

penduduk produktif di Malaysia dan Vietnam mencapai lima kali lipat dari Indonesia.

"Saya kaget Indonesia di angka 0,45 persen. Negara tetangga kita, Viet-

nam dan Malaysia, sudah di angka 2,43 persen. Negara maju 9,8 persen. Jauh sekali," kata Jokowi pada pembukaan Konvensi Kampus XXIX dan Temu Tahunan Forum Rektor Indonesia di Surabaya, Senin (15/1).

Jokowi mengatakan hal ini seharusnya tidak terjadi. Menurutnya, Indonesia butuh sumber daya manusia yang unggul untuk menghadapi kompetisi global di

beberapa tahun ke depan.

Dia akan mengumpulkan para menteri khusus membahas hal ini. Menurut Jokowi, pemerintah harus menggelontorkan anggaran untuk mengintervensi fenomena ini.

"Saya minggu ini akan rapatkan ini dan mengambil kebijakan, policy, untuk mengejar angka yang masih 0,45 persen," ujar dia.

Jokowi menambahkan, "Enggak

tahu anggarannya didapatkan dari mana, tetapi kita carikan agar betul-betul bisa naik secara drastis."

Jokowi pun bercerita hasil kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat. Dia melihat kampus-kampus di Amerika Serikat, khususnya di bidang teknologi, didominasi mahasiswa dari China dan India.

Pada saat yang sama, hanya ada

sekitar lima orang mahasiswa asal Indonesia di kampus-kampus itu. Dia mengatakan pendidikan tinggi penting dan menjadi modal negara berkembang untuk maju.

"Saya kemudian berpikir, 'Oh, inilah yang menyebabkan yang namanya China, Tiongkok, itu melompat maju di 20 tahun terakhir ini dan melampaui negara-negara yang sudah maju,'" katanya. (*)

Harian Pagi
Baubau Post
Kritik, Lugas, Independen
Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun saat melakukan tugas jurnalistik
Dalam pelaksanaan tugas, wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post
Segala Berita yang diterbitkan oleh Baubau Post merupakan tanggungjawab penanggungjawab Redaksi

Pemimpin Umum : Fauzan NWA
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Ardi
Redpel : Hengky TA
Korlip : Hengky T.A
Redaktur : Alyakin, Kasrun
Reporter : R a h m a n , ,mashuri, Jaya, Azis, , Lisma

Layouter : Ririn
Pracetak : Aditya
Cetak : Jamal

Penerbit : PT. Faren Grafika
Komisaris : Erna Agule
Direktur Utama : Andina Latief, SKM
Manager Keuangan dan Pemasaran : Nabila D.A
Manager Iklan : Fauzan
Kepala Sirkulasi : Jamal
Administrasi : Salvana
Security :

Kepala Biro Wakatobi : Risman
Kepala Biro Buton Utara : Fauzan
Kepala Biro Buton : Rahman
Kepala Biro Busel : Salvana
Kepala Biro Buteng : Andini
Kepala Biro Bombana :
Kepala Biro Sultra :

Kontributor Baubau : Iphul, Kontributor Sultra : Amat Jr
Kontributor Buton : Kontributor Butur : Kasrun,
Kontributor Buteng : Hengki TA, Kontributor Busel : Amirul

Baubau : Jaya
Agen Pasarwajo :
Agen Butur : Samrihan

Harga Langganan : Dalam Kota Baubau Rp. 100.000,-/bulan,
Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim,
Eceran Dalam Kota Baubau : Rp.5.000,-

Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl. Raya Palagimata, BTN Palagimata, Blok K-L No. 1
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau
Tlp. 0402-2814207 - Email : baubaupost2019@gmail.com
Percetakan : PT. Faren Grafika, Alamat: Jl. Raya Palagimata Blok K No 01, Kel. Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

Polisi di Kendari Ditangkap Propam karena Diduga LGBT

Pewarta: Alwan

SULTRA -- Seorang anggota polisi di Kendari, Bripda AN diamankan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Tenggara setelah diduga terlibat kasus seks menyimpang atau LGBT.

Bripda AN, yang bertugas di Polresta Kendari, kini dalam pengawasan Bidang Propam Polda Sultra.

"Iya benar, tanggal

10 kemarin. Sudah seminggu lalu," kata Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Ferry Walintukan, Rabu (17/1).

Ferry menerangkan bahwa Bripda AN ditangkap berkat pengembangan kasus dari Polda Sumatera Barat setelah pasangannya yang juga seorang anggota polisi diamankan lebih dulu.

"Iya (pasangannya di Sumbar). Pokoknya pengembangan dari Sumatera

Barat," ungkapnya.

Saat ini, kata Ferry Bripda AN masih dalam pemeriksaan oleh pihak Propam Polda Sultra dan terancam sanksi yang berat.

Ada sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias pemecatan bagi anggota yang terbukti terlibat kasus seks menyimpang.

"Kalau LGBT bisa dipecatlah. Sekarang masih di Propam untuk pendalaman," imbuhnya. (*)

Hakim MK Arsul Sani yang Baru Dilantik Punya Harta Rp31 Miliar



Hakim konstitusi Arsul Sani tercatat memiliki kekayaan senilai Rp31 miliar. Ia baru saja dilantik menggantikan Wahiduddin Adams.

Laporan: Hadi

JAKARTA-- Arsul Sani yang baru saja mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai harta kekayaan senilai Rp31 miliar.

Dilansir laman elhkpn.kpk.go.id, Arsul melaporkan harta kekayaan tersebut ke KPK pada 8 Maret 2023 saat menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Arsul mempunyai delapan bidang tanah dan bangunan senilai total Rp30.807.000.000. Rinciannya yaitu sebagai berikut.

1. Tanah dan bangunan seluas 1.396 meter persegi/600 meter

persegi di Kab/Kota Bekasi, hasil sendiri, Rp3.650.000.000.

2. Tanah dan bangunan seluas 122 meter persegi/115 meter persegi di Kab/Kota Bekasi, hasil sendiri, Rp335.000.000.

3. Bangunan seluas 264 meter persegi di Kab/Kota Jakarta Barat, hasil sendiri, Rp4.000.000.000.

4. Tanah dan bangunan seluas 14.037 meter persegi/600 meter persegi di Kab/Kota Batang, hasil sendiri, Rp2.150.000.000.

5. Tanah seluas 2.916 meter persegi di Kab/Kota Batang, hasil sendiri, Rp452.000.000.

6. Tanah dan bangunan seluas 203 meter persegi/320 meter persegi di Kab/Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri,

Rp3.000.000.000.

7. Tanah dan bangunan seluas 224 meter persegi/300 meter persegi di Kab/Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri, Rp9.220.000.000.

8. Tanah dan bangunan seluas 220 meter persegi/300 meter persegi di Kab/Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri, Rp8.000.000.000.

Arsul turut mencantumkan kepemilikan kendaraan seharga Rp287.000.000, yang terdiri dari Mobil Honda Accord Sedan tahun 2013 Rp130.000.000, Motor Honda tahun 2013 Rp7.000.000, dan Mobil Nissan Elgrand Jeep tahun 2010 Rp150.000.000. Seluruh kendaraan merupakan hasil sendiri.

Selain itu, Arsul yang pernah duduk di Komisi III DPR RI juga mempunyai harta bergerak lainnya Rp124.250.000, surat berharga Rp56.000.000, kas dan setara kas Rp2.672.059.452 serta utang Rp2.722.418.251.

"Total kekayaan Rp31.223.891.201," demikian tertuang dalam LHKPN.

Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan laporan tanggal 1 Maret 2022 sebesar Rp26.005.784.028.

Arsul Sani terpilih sebagai hakim MK yang diajukan DPR. Ia menggantikan hakim konstitusi Wahiduddin Adams yang memasuki masa pensiun pada 17 Januari 2024. (*)

Petani di Bekasi Jadi Korban Pemalsuan Dokumen, Ditagih Utang Rp4 M



Polres Metro Bekasi tengah menyelidiki kasus dugaan pemalsuan dokumen milik petani bernama Kacung Supriatna (63) untuk pengajuan pinjaman ke bank. Ilustrasi

Pewarta: Alwan

JAKARTA, BP-Polres Metro Bekasi tengah menyelidiki kasus dugaan pemalsuan dokumen milik petani bernama Kacung Supriatna (63) untuk pengajuan pinjaman ke bank. Korban pun ditagih utang hingga Rp4 miliar.

Kasie Humas Polres Metro Bekasi AKP Ahmadi menyebut Kacung mengaku menjadi korban penipuan oleh pelaku berinisial G yang memalsukan sertifikat tanah miliknya.

"Penanganan masalah kasus petani itu sudah ditangani intensif oleh Satreskrim Polres Metro Bekasi," kata Ahmadi dalam konferensi pers, Rabu (17/1).

Ahmadi menjelaskan korban menduga dokumen tersebut di-

palsukan oleh pelaku untuk mengajukan pinjaman ke Bank sebesar Rp4 Miliar.

Ia mengatakan aksi penipuan itu kemudian diketahui oleh korban usai di tagih oleh pihak Bank pada tahun 2021. Kendati demikian, Ahmadi menyebut pelaporan itu baru dilakukan pada Januari 2024.

"Kasus bermula ketika korban menitipkan sertifikat kepada pelaku, namun ternyata oleh pelaku malah digadaikan. Semua identitas korban di palsukan," jelasnya.

Kakek Nenek Cedera Serius Usai Tersangkut Bendera Parpol di Mampang

Dalam kasus ini, Ahmadi menyebut pelaku diduga melanggar Pasal 263 jo Pasal 264 jo 273 dan/atau Pasal 385 KUHP dengan ancaman maksimal 5 ta-

hun penjara.

"Sehingga dari penyelidikan kita terapkan ada 5 pasal yakni 263, 264, 266, 273 dan juga 385 dengan ancamannya kumulatif dari 4 sampai 8 tahun penjara," ujarnya.

Sementara itu dikutip dari CNN Indonesia TV, Kacung mengaku sempat didatangi oleh tiga orang penagih utang dari salah satu bank pada 2021.

Kacung menyebut ketiganya langsung mendatangi rumah miliknya dan meminta agar segera membayar tanggungan utang sebesar Rp4 miliar.

"Katanya saya punya tanggungan Rp3 miliar lebih sampai Rp4 miliar, saya enggak ngerasa punya utang sampai Rp4 miliar, Rp100 ribu juga saya mah enggak pernah minjem," kata Kacung. (*)

annya secara tertulis melalui mekanisme kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA).

"(Kesaksian) dilakukan secara tertulis atau written interrogatories," kata Herwatan dalam keterangannya, Rabu (17/1).

Herwatan melanjutkan, demi mempersiapkan posisi Pemerintah Indonesia menyangkut teknis pengambilan kesaksian tersebut maka Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham mengundang Kejati DIY untuk menggelar rapat koordinasi.

Sejauh ini pun, masih belum ada keterangan detail dari Kemenkumham dan Kejati DIY soal kasus TPPO yang akan meminta kesaksian Mary Jane tersebut.

Terpidana Mati Mary Jane Jadi Saksi Perdagangan Orang di Filip

Pewarta: Alwan

YOGYAKARTA -- Terpidana mati kasus penyalahgunaan narkoba WN Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso bakal bersaksi untuk sebuah kasus

tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terjadi di negaranya.

Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati DIY Herwatan mengatakan, Pemerintah Filipina telah men-

nyampaikan kesaksian Mary Jane diperlukan dalam proses hukum terkait kasus TPPO yang melibatkan tiga orang bernama Sergio, Lakanilao dan Ikee.

Sesuai kesepakatan, Mary Jane akan menyampaikan kesaksi-



Rapat koordinasi Kemenkumham dan Kejati DIY soal Mary Jane tersebut rencananya dilaksanakan pada 18-20 Januari 2024 di Hotel Royal Ambarrukmo, Sleman, DIY.

Mary Jane asal Bulacan, Filipina, ditangkap kepolisian di Bandar Udara Adisutjipto, Yogyakarta, pada 25 April 2010 lantaran

kedapatan menyelundupkan 2,6 kilogram heroin.

Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan hukuman mati kepada Mary Jane karena dinilai melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mary Jane mengaku hanya diperalat untuk membawa barang haram tersebut. Ia pun

masuk dalam daftar terpidana mati yang dieksekusi pada April 2015 di Nusakambangan. Namun, nasib Mary Jane masih menggantung lantaran eksekusi mati tersebut ditunda. Sejak Maret 2021, ia menghuni Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta di Rejosari, Baleharjo, Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. (*)

Jumat, 19 Januari 2024

Dr Muh Rasman Manafi : Jangan Pernah Berhenti Maksimalkan Potensi



Pewarta: Amran

BAUBAU, BP- Upacara peringatan hari kesadaran nasional 17 Januari 2024 dipimpin langsung Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si di halaman kantor Wali Kota Baubau Palagimata Senin (17/1/2024).

Dalam arahnya, orang nomor satu di Kota Baubau ini

menyampaikan, ini adalah ajang introspeksi diri bagi seluruh aparat, dalam upaya meningkatkan disiplin dan kinerja serta profesionalisme, sekaligus sebagai ajang silaturahmi antar pegawai di lingkup Pemkot Baubau.

Oleh sebab itu, jangan pernah berhenti untuk memaksimalkan potensi yang ada, guna

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, karena masyarakat menaruh harapan besar terhadap pelayanan yang baik, efisien, jujur dan berwibawa.

“Melalui kegiatan hari kesadaran nasional ini, hendaknya mampu memperkuat kesadaran dan semangat kita sebagai seorang abdi negara dan masyarakat dalam menjalankan tugas dan kewajiban, yang sejatinya mengandung tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Mari selalu meniatkan berbagai aktivitas yang kita lakukan sebagai bagian upaya menebar banyak manfaat di tengah masyarakat. Insya Allah dengan demikian setiap langkah kita untuk bekerja sebagai abdi negara akan terasa lebih ringan dan menjadi ibadah,” ungkapnya.*

Pemkot Baubau Gelar Pasar Murah Dari Tanggal 16-18 Januari 2024

Pewarta: Amran

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian terus gencar melakukan pasar murah bahkan sampai di seluruh kecamatan yang ada dalam wilayah Kota Baubau. Teranyar, Pemkot Baubau akan menggelar pasar murah pada Selasa (16/1/2024) yang akan dilaksanakan di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau.

Kepala Dinas Kominfo Kota Baubau H Andi Hamzah

Machmud, S.Sos, M.Si, mengungkapkan, operasi pasar murah yang akan digelar Pemkot Baubau di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau dimaksudkan dalam rangka menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok yang berdampak kepada masyarakat. Disamping itu, pasar murah akan membantu menekan harga bahan pokok.

Beberapa komoditas bahan pokok yang akan dijual dalam operasi pasar murah tersebut menurut Kadis Kominfo

Kota Baubau H Andi Hamzah Machmud yakni beras (5kg) dengan harga Rp 53 000, telur (1 rak) harga Rp 50 000, gula (1 kg) harga Rp 16 200 dan minyak goreng (1 liter) harga Rp 18 000.

H Andi Hamzah Machmud berharap, dengan upaya yang dilakukan Pemkot Baubau akan mampu menekan komoditas harga bahan pokok. Disamping itu, agar Masyarakat yang ada di Kota Baubau bisa memanfaatkan moment operasi pasar murah ini untuk membeli kebutuhan pokok.*

Disperindag Baubau Siapkan 4 Ton Berbagai Komiditas Untuk Pasar Murah

Pewarta: Amat Jr

BAUBAU, BP-Pemkot Baubau melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) mulai menggelar pasar murah di kantor Disperindag Selasa (16/1/2024). Untuk persiapan pasar murah pada Senin (16/1/2024), Disperindag Kota Baubau menyiapkan 4 ton untuk beberapa komoditas bahan pokok.

Menurut Kadis Perindag Kota Baubau H Ali Hasan, SE, M.Si, pada hari pertama di pasar murah ini pihaknya menyiapkan untuk beras kurang lebih 2 ton. Kemudian, gula pasir 1 ton, minyak

goreng 1 ton juga. Untuk minyak goreng sendiri, ada banyak macam ada minyak goreng premium ada Bimoli, Sania dan minyak goreng kita.

Dikatakan, kegiatan pasar murah ini memang rutin akan dilaksanakan dan kebetulan sekarang awal tahun 2024 ini tetap dilaksanakan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau.

“ Hari ini coba kita lakukan dengan menggandeng semua distributor yang ada di Kota Baubau dalam hal ini ada Hypermart, Alfamidi, Indomaret, termasuk distributor telur dan Bulog. Mereka ikut berpartisipasi

Januari, Pemkot Baubau Akan Selenggarakan Musrenbang



Pewarta : Amat Jr

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau pada bulan Januari 2024 ini memiliki beberapa agenda penting diantaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang harus segera terlaksana pada Tingkat Kelurahan.

Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si saat upacara hari kesadaran nasional Tingkat Kota Baubau Senin (17/1/2024) mengatakan, pada pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan di bulan Januari 2024 ini diharapkan agar dalam tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dimaksud terutama dalam pelaksanaan forum

publik dan Musrenbang, seluruh pemangku kepentingan dapat senantiasa menyelenggarakan perencanaan dengan program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan harapan masyarakat. Sedangkan bagi para Camat, Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si berpesan agar agar dapat ikut berperan aktif pada pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan sehingga pelak-

sanaam Musrenbang dapat berjalan lancar dan efektif sebagai wadah aspirasi masyarakat ditingkat kelurahan.

“Kami mengajak bapak-ibu tingkatkan kinerja, dedikasi, pengabdian kita untuk membangun negeri yang kita cintai ini. Tanamkan semangat bahwa satu tetes keringat dari bapak-ibu sangat bernilai bagi keberhasilan pembangunan

daerah ini sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera dan mandiri,” ujarnya.

Orang nomor satu di Kota Baubau ini mengajak kepada semua ASN untuk bersama-sama meningkatkan koordinasi dan konsultasi baik antar perangkat daerah lingkup Pemkot Baubau, dengan Pemerintah Provinsi Sultra, maupun Pemerintah Pusat terkait hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, agar kinerja pemerintah daerah secara umum dapat meningkat dan menjadi lebih baik.*



pasi banyak terkait dengan ini,”katanya. Ditambahkan, barang-barang yang dijual berdasarkan harga distributor, harga langsung. Kalau di pasar itu misalnya telur 56 ribu dan Disperindag dijual 50 ribu. Kemudian gula pasir di pasar 19 ribu Disperindag 17 ribu. Kalau beras

langsung dari Bulog harga beras SPHP dengan harga 53 ribu per 5 Kg.

H Ali Hasan berharap masyarakat bisa datang belanja. Apalagi, pihaknya sudah menyampaikan melalui Camat, Lurah, RT dan RW untuk diteruskan kepada masyarakat.

Disamping itu, dengan adanya pasar murah ini juga bisa mengimbangi harga yang ada di pasar. Artinya pada saat ada kenaikan inilah langkah solusi dari pemerintah untuk menekan harga yang ada di pasar.

“Saya kira kita tinggal menunggu waktu

saja karena belum banyak masyarakat yang tahu dan sebentar lagi akan banyak pengunjung kalau dilihat dari pengalaman sebelumnya. Ini kita coba 3 hari setelah itu nanti kita lanjut lagi sampai mendekati puasa dan lebaran yang akan datang,” tutupnya.*